

Kabupaten Demak dirasa perlu memberikan pemahaman pada kelompok nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta memberikan pemahaman akan pentingnya memahami regulasi yang ada agar pemberdayaan nelayan dapat berjalan maksimal dengan meminimalisir faktor penghambat, dan meningkatkan faktor pendukung dalam pemberdayaan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta, 1991.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Dinas Kelautan dan Perikanan. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.” Demak, 2019.

Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hikmat, H. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.

Hoeve, Ichtiar Baru Van. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

Huda, Ni“Matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Johnny Ibrahim, 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kementrian kelautan dan Perikanan. *Rencana Strategis Kementerian Kelautan Tahun 2015 - 2019*. Jakarta: Kementrian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017.

Kusnadi. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007.

———. “Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir.” *Lembaga Penelitian Universitas Jember*, 2009, 73.

- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Puspitaningsih. *Mengenal Ekosistem Laut Dan Pesisir*. Bogor: Pustaka Sains, 2012.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah : Upaya Mengatasi Kegagalan*. Jakarta Selatan: Kata Penerbit, 2012.
- Satria, Arif. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial Dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suratman, and H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 1 Angka 12 No. 23. “Pemerintahan Daerah.” In *Lembaran Negara Republik*

Indonesia, 2014.

Pasal 1 Angka 2 UU No. 23. “Pemerintahan Daerah.” In *Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.*

Pasal 1 Angka 23 UU No. 23. “Pemerintahan Daerah.” In *Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.*

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 1. “Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490, 2014.*

Pasal 1 Angka 6 UU No. 23. “Pemerintahan Daerah.” In *Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.*

Pasal 1 Undang-Undang No 45. “Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 2009.*

Pasal 18 Undang Undang Dasar. “Pembukaan.” In *Undang-Undang Republik Indonesia, 1945.*

Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. “Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490, 2014.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41. “Organisasi Perangkat Daerah.” In *Lembaran Negara Republik Indonesia, 2007.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16. “Bagi Hasil Perikanan.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690, 1964.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. “Pemerintahan Daerah.” In

Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7. “Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870*, 2016.

Jurnal :

Purwanto, Erwan Agus. “Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik* 10 (2006): 188.

Putra, Okta Pradita Kusuma. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Pati.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).

Ramadhan, Muhammad, and Taslim Arifin. “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Geomatika* 19, no. 2 (2013): 141.

Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Lampung* 9, no. 4 (2015): 579.

Internet:

wikipedia.org. “Perangkat Daerah.” [id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah), 2021.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah. (diakses tanggal 5 September 2021)